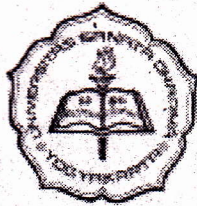


Ijazah Palsu dan Mentalitas Bangsa

Oleh : Hendra Kurniawan



MEMPEROLEH gelar sarjana menjadi dambaan banyak orang. Kaum terpelajar yang mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi tentu akan bercita-cita untuk segera menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar. Bukan hanya bangga, namun juga gelar itu sangat diperhitungkan dalam mencari pekerjaan dan hidup bersama di tengah masyarakat. Menyandang gelar sarjana menjadi sarana untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Seseorang yang bergelar sarjana akan memiliki prestise di mata masyarakat.

Dewasa ini muncul kesan bahwa sarjana sudah *ngembranch*, di mana-mana ada, mutunya seringkali dipertanyakan karena demikian mudah diperoleh. Isu mengenai gelar palsu dan ijazah palsu bukan baru-baru ini saja muncul. Sejak dulu banyak gelar sarjana yang palsu atau dapat dibeli. Tentu hal ini tidak dapat dilihat sepintas lalu dari orang yang menyandang gelar. Perlu ada upaya menelusuri lebih lanjut dengan melihat latar belakang perguruan tinggi atau lembaga yang menerbitkan ijazah dan gelar tersebut.

Mencari tahu dan mengkonfirmasi ke perguruan tinggi atau lembaga memang dapat menjadi salah satu cara mengetahui keabsahan ijazah dan gelar yang dimiliki seseorang. Akan tetapi persoalannya tentu tidak gampang itu karena bisa saja perguruan tinggi atau lembaga yang bersangkutan juga

abal-abal sehingga berani mengklaim lulusannya. Kasus inilah yang terjadi belum lama di sebuah lembaga pendidikan yang mengaku bekerja sama dengan universitas dari luar negeri. Ini bukanlah kasus tunggal, tentu tidak menutup bahwa masih ada permasalahan-permasalahan serupa yang perlu diungkap.

Suasana ilmiah

Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang baik harus dapat menunjukkan suasana ilmiah. *Pertama*, adanya perkuliahan yang normal dan sesuai standar mutu. *Kedua*, keberadaan dosen yang jelas dengan persentase besar untuk dosen tetap. *Ketiga*, keberadaan mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik maupun non akademik di kampus. Dinamika civitas academica seperti inilah yang menggambarkan suasana ideal sebuah kampus. Tentu ini di luar persoalan administrasi lainnya yang juga harus dipenuhi seperti akreditasi lembaga maupun tercatat keberadaannya secara resmi oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi maupun Koordinator Perguruan Tinggi untuk swasta.

Pembentukan diri seseorang menjadi sarjana tidak dapat berjalan ala kadarnya. Jika semua perguruan tinggi atau lembaga pendidikan

bersikap demikian maka tak dapat dibayangkan bagaimana produk sarjana-sarjana di Indonesia. Secara kuantitas jelas akan meningkat drastis, namun berbanding terbalik dengan kualitasnya.

Akhirnya gelar sarjana lambat laun menjadi tidak berarti lagi di mata masyarakat. Kesarjanaan kehilangan nilai ilmiah dan hanya

menjadi sekedar gelar untuk kebanggaan yang semu demi mendapatkan pekerjaan dan kedudukan.

Ironis apabila para elite politik baik di tingkat lokal maupun nasional menjadi pemilik ijazah dan gelar palsu. Buktinya memang sudah banyak kasus ijazah palsu yang melibatkan nama pejabat tertentu, wakil rakyat, hingga kepala daerah. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, bahkan menyebut peredaran ijazah palsu telah demikian mengkhawatirkan. Ini tentu saja menjatuhkan marwah pendidikan dan sistem pendidikan nasional Indonesia yang sedang merangkak untuk menuju pada kelas internasional. Memberantas jual beli ijazah palsu sama sulitnya dengan memberantas korupsi.

Persoalan mental

Sudah terlalu banyak kepalusuan yang terjadi di negeri ini. Hampir bersamaan dengan hebohnya ijazah

palsu muncul pula berita mengenai beras palsu, kemiri palsu, merica palsu, hingga susu bubuk palsu. Berbagai kebutuhan pangan yang menyangkut hajat hidup masyarakat kini pun banyak dimanipulasi demi kepentingan ekonomi. Dalam politik praktis, rakyat juga sudah biasa menerima janji palsu yang biasa digembor-gemborkan saat kampanye. Apalagi dengan persoalan ijazah yang tidak semua orang menjadi penggunanya. Ijazah dianggap sebagai sekedar formalitas. Bahaya kepalusuan telah menyelimuti banyak sendi kehidupan dan menjadi ancaman yang serius.

Semua pada akhirnya harus kembali pada persoalan mental. Berbagai hal yang terjadi saat ini merupakan indikasi mulai runtuhnya mental dan moral bangsa. Sesama anak bangsa sekarang terang-terangan saling memakan satu sama lain.

Homo homini lupus, manusia menjadi serigala atas manusia lain. Berlakulah hukum rimba. Manusia terjebak pada kedangkalan dalam memaknai kehidupan ini. Segala cara instan dilakukan tanpa peduli baik atau tidak, benar atau salah. Kegentingan ini menunjukkan bahwa pembangunan karakter bangsa harus segera dimulai demi masa depan negara ini. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.